

Pengukuran Kinerja Anggaran Dengan Pendekatan *Value for Money*

Aulia Isnaeni Zahra¹, Slamet Usman Ismanto²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung

* E-mail Korespondensi: aulia21012@mail.unpad.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 26-01-2025

Revision: 28-01-2025

Published: 28-01-2025

DOI Article:

10.24905/permana.v16i2.632

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi masalah terkait beberapa kegiatan yang tingkat realisasi anggarannya tidak mencapai 100% selama tahun 2021-2023. Selain itu, pada tahun 2021, banyak realisasi kinerja di beberapa subkegiatan berada di bawah 80%. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat dari tahun 2021-2023. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan *value for money* yang menghitung tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Data yang digunakan meliputi data sekunder berupa dokumen Laporan Kinerja dan Rencana Kerja periode 2021-2023, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ekonomis mencapai rata-rata 96,27% selama periode 2021-2023, masuk dalam kriteria cukup ekonomis. Aspek efektivitas juga menunjukkan capaian yang positif dengan nilai rata-rata di atas 100%, memenuhi kriteria efektif. Namun, pada aspek efisiensi, terdapat fluktuasi yang menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya, terutama dengan tingkat efisiensi di atas 100% pada tahun 2023 yang masuk dalam kategori tidak efisien. Kesimpulannya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat telah menunjukkan kinerja anggaran yang baik dalam aspek ekonomis dan efektivitas, namun memerlukan perbaikan dalam aspek efisiensi.

Kata Kunci: Kinerja Anggaran, Value for money, Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas, Sekretariat DPRD Jawa Barat

ABSTRACT

This research was motivated by indications of problems related to several activities whose budget realization rate did not reach 100% during 2021-2023. In addition, in 2021, many performance realizations in several sub-activities were below 80%. This study aims to measure the budget performance of the Regional Government Affairs Support Program at the Secretariat of DPRD of West Java Province

Acknowledgment

from 2021-2023. The method used is a quantitative method with descriptive analysis techniques using a value for money approach that calculates the level of economy, efficiency and effectiveness. The data used includes secondary data in the form of Performance Report and Work Plan documents for the 2021-2023 period, as well as primary data obtained through interviews and observations. The results show that the economic value reaches an average of 96.27% during the 2021-2023 period, which is included in the fairly economical criteria. The effectiveness aspect also shows positive achievements with an average value above 100%, meeting the effective criteria. However, in the efficiency aspect, there are fluctuations that become a challenge in resource management, especially with an efficiency level above 100% in 2023, which falls into the inefficient category. In conclusion, the Regional Government Affairs Support Program at the West Java Provincial DPRD Secretariat has shown good budget performance in terms of economy and effectiveness, but requires improvement in terms of efficiency.

Key word: *Budget Performance, Value for money, Economy, Efficiency, Effectiveness, West Java DPRD Secretariat*

© 2024 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Administrasi Keuangan Publik memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan sektor publik, khususnya dalam hal penganggaran. Sebagai alat perencanaan dan pengendalian, penganggaran publik menentukan alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan pemerintah (Mardiasmo, 2018). Proses ini tidak hanya berfokus pada perencanaan penggunaan anggaran, tetapi juga menjadi bagian dari akuntabilitas dan transparansi pemerintah kepada masyarakat. Penganggaran Publik melibatkan berbagai pihak dan bertujuan untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan efektif dalam mencapai tujuan kebijakan pemerintah.

Penganggaran dan perencanaan adalah dua elemen yang saling berkaitan, dan keduanya diperlukan untuk mengelola pembangunan secara efektif dan efisien. Anggaran adalah rencana yang diungkapkan dalam bentuk ukuran keuangan dan disusun secara sistematis, mencakup seluruh kegiatan dalam periode waktu tertentu untuk masa mendatang. Maka dari itu, anggaran memainkan peran krusial dalam pengambilan keputusan, pengendalian, dan perencanaan

(Adnyana, 2020). Proses penganggaran menghasilkan dokumen anggaran yang merinci rencana pendapatan dan pengeluaran untuk periode waktu tertentu. Dalam konteks sektor publik, anggaran berperan sebagai instrumen untuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan publik serta pelaksanaan proyek yang didanai dengan dana publik. Karena sumber dana berasal dari publik, anggaran harus disampaikan kepada masyarakat untuk memastikan transparansi dan memungkinkan kritik. Selain itu, anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan keuangan yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan program kerja organisasi.

Pada awalnya, Indonesia menggunakan pendekatan penganggaran tradisional (*Traditional Budgeting*). Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan tuntutan terhadap transparansi, penganggaran berbasis kinerja (*Performance-Based Budgeting*) muncul sebagai solusi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Hal tersebut didukung oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara reformasi mengenai sistem penganggaran di Indonesia terjadi, seluruh satuan kerja pemerintah yang ada di Indonesia berubah menjadi Performance Budgeting atau penganggaran berbasis kinerja. Penganggaran berbasis kinerja mengintegrasikan hubungan antara keuangan dan kinerja untuk memastikan efisiensi dan transparansi. Penganggaran berbasis kinerja akan menyediakan akuntabilitas keuangan dan program yang dalam hal ini pengeluaran terikat dengan aktivitas dan keuangan pusat (Lamidi, 2022).

Kinerja penganggaran publik yang baik, harus memprioritaskan dan meningkatkan profesionalitas dalam menyediakan pelayanan publik. Dengan penganggaran yang baik, pembuat kebijakan dapat membuat keputusan yang lebih efektif dan meningkatkan kinerja mereka. Untuk memastikan efektivitas penggunaan anggaran, pengukuran kinerja menjadi elemen penting. Kinerja, menurut Bernandin dan Russel dalam Sulisworo (2009) adalah catatan tentang hasil kerja yang telah dicapai dalam melaksanakan berbagai tugas atau kegiatan dalam periode waktu tertentu. Sedangkan pengukuran kinerja merupakan penilaian yang melibatkan evaluasi tentang seberapa jauh pekerjaan telah berkembang sehubungan dengan tujuan yang telah dibuat dan ditetapkan, serta mencakup informasi tentang efektivitas dalam mencapai tujuan, perbandingan realisasi dengan target kinerja, efisiensi tentang pemanfaatan sumber daya untuk mendapatkan baik barang maupun jasa, dan kualitas terkait barang atau jasa tersebut (Mahmudi, 2019). Dalam hal ini kinerja yang diukur difokuskan pada proses program tersebut dijalankan, layanan atau produk yang dihasilkan (*output*), dan dampak dari layanan atau produk tersebut (*outcome*) (Sulisworo, 2009). Ketiga variabel tersebut saling terhubung

yang tidak dapat dipisahkan dan berperan penting dalam pengukuran kinerja.

Salah satu satuan kerja pemerintah yang menggunakan pendekatan ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya, DPRD Jawa Barat didukung oleh Sekretariat DPRD yang memiliki fungsi utama yaitu menyelenggarakan administrasi keuangan daerah, menyelenggarakan rapat, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan daerah dan menyelenggarakan serta penyedia koordinasi tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD (Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, 2024). Salah satu program Sekretariat DPRD Jawa Barat adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Program tersebut merupakan bagian dari kegiatan administrasi yang mendukung kelancaran tugas DPRD. Program ini berfungsi untuk memberikan dukungan teknis, administratif, dan fasilitas yang diperlukan oleh DPRD agar mereka dapat menjalankan fungsi legislasinya secara efektif dan efisien.

Berdasarkan data dari Laporan Kinerja (LAKIN) yang menyajikan gambaran dan informasi mengenai capaian pelaksanaan program, serta Rencana Kerja (Renja) yang merinci mengenai rencana program yang akan dilaksanakan dalam suatu periode tertentu, realisasi anggaran untuk kegiatan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat selama tahun anggaran 2021-2023 menunjukkan bahwa pencapaian anggaran tersebut belum sepenuhnya optimal, dengan beberapa kegiatan tingkat realisasinya tidak mencapai 100%. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan anggaran. Situasi ini terjadi seiring dengan transisi dari masa pandemi COVID-19, dimana banyak kegiatan terhambat sehingga realisasi kinerja pada beberapa subkegiatan berada di bawah 80% serta adanya beberapa subkegiatan yang capaian kinerjanya menurun drastis pada tahun 2021 ke 2022. Rendahnya kinerja ini tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh penyesuaian internal yang perlu dilakukan oleh organisasi untuk beradaptasi dengan kondisi baru. Meskipun terdapat peningkatan yang signifikan dalam realisasi anggaran pada tahun 2022 dan 2023, perbaikan ini belum sepenuhnya mampu mengatasi dampak negatif dari kinerja yang rendah pada tahun sebelumnya. Akibatnya, DPRD Provinsi Jawa Barat belum dapat melaksanakan program atau kegiatan secara maksimal.

Penurunan dan peningkatan realisasi anggaran serta capaian kinerja tersebut mencerminkan pentingnya perencanaan yang matang dan pengawasan yang lebih ketat. Untuk itu, pengukuran kinerja anggaran menjadi aspek yang sangat penting. Pengukuran ini dapat memastikan bahwa alokasi dan penggunaan sumber daya publik dilakukan secara efektif, efisien,

dan ekonomis, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menilai kinerja adalah pendekatan *value for money*. Pengukuran *value for money* menurut Mahmudi (2019) menekankan pada pencapaian hasil yang optimal dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, yang berarti setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Ekonomis, efisiensi, dan efektivitas merupakan indikator yang ada pada *value for money*. Ekonomis merujuk pada penghematan atau tepat guna, efisiensi berarti penggunaan sumber daya secara optimal, dan efektivitas mengukur sejauh mana suatu program berhasil mencapai tujuannya (Mardiasmo, 2018). Ketiga komponen tersebut merupakan pilar utama dalam pengukuran kinerja sektor publik. Melalui penerapan pengukuran *value for money*, organisasi publik dapat menilai sejauh mana anggaran dikelola secara optimal untuk mencapai tujuan strategisnya. Dengan demikian, pengelolaan anggaran yang berorientasi pada prinsip *value for money* tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memastikan bahwa dana publik digunakan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti menganalisis data dengan menggunakan pengukuran kinerja *value for money* yang memiliki tujuan untuk mengukur kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari tahun 2021–2023 telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip *value for money* yaitu efisiensi, efektivitas, dan ekonomis dalam mencapai tujuan yang telah dibuat dan ditetapkan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019) metode kuantitatif meneliti atau mempelajari populasi atau sampel tertentu yang berlandaskan pada filsafat positivisme, dimana data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen penelitian. Metode kuantitatif ini pendekatan yang mengandalkan data numerik dan analisis statistik untuk memahami fenomena tertentu. Penelitian ini juga menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Samsu (2017) penelitian deskriptif dalam metode kuantitatif memberikan gambaran yang jelas tentang subjek maupun objek yang diteliti sesuai dengan kondisi sebenarnya, tanpa mengubah kondisi yang ada.

Objek penelitian dalam studi ini adalah kinerja anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan

meliputi data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh dari dokumen Laporan Kinerja (LAKIN) dan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Jawa Barat. Sementara itu, data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan serta observasi langsung untuk memahami proses penganggaran dan pengukuran kinerja di DPRD Provinsi Jawa Barat, yang juga berfungsi untuk mendukung data sekunder.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan atau merangkum data yang diperoleh secara rinci tanpa melakukan generalisasi yang lebih luas (Sugiyono, 2019). Dalam melakukan analisis data, peneliti mengacu pada teori *value for money* menurut Mahmudi (2019) dengan melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah yang meliputi 3 elemen utama yaitu 3E (Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas).

HASIL

Analisis data akan menggunakan pengukuran kinerja *value for money* yang merupakan elemen penting dalam mengevaluasi kinerja organisasi publik, dengan fokus pada 3 (tiga) komponen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas (Mahmudi, 2019). Dalam penelitian ini, pendekatan *value for money* diterapkan untuk mengevaluasi kinerja anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat selama periode 2021-2023.

Tingkat Ekonomis

Berdasarkan hasil perbandingan data yang diperoleh, berikut perhitungan kriteria ekonomi untuk setiap kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD Jawa Barat tahun 2021. Evaluasi ini bertujuan menilai sejauh mana program tersebut telah dilaksanakan secara ekonomis dalam penggunaan anggaran dari tahun ke tahun. Perhitungan ekonomis pada tingkat kegiatan tahun 2021 dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perhitungan Ekonomis Tahun 2021

No	Kegiatan	Belanja		Ekonomis	Kriteria Menurut Mahmudi (2019)
		Anggaran	Realisasi		
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	975.392.067	973.042.961	99,76%	Cukup Ekonomis
2	Administrasi Keuangan	26.530.730.426	24.889.257.530	93,81%	Cukup

Perangkat Daerah					Ekonomis
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	393.512.500	321.409.499	81,68%	Kurang Ekonomis
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	22.117.909.929	21.232.254.374	96,00%	Cukup Ekonomis
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.712.096.418	2.654.481.216	97,88%	Cukup Ekonomis
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	23.469.217.628	22.595.934.523	96,28%	Cukup Ekonomis
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	34.206.523.844	33.258.247.505	97,23%	Cukup Ekonomis
8	Layanan Administrasi DPRD	3.527.378.652	3.514.557.605	99,64%	Cukup Ekonomis
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	168.168.029.904	162.223.677.311	96,47%	Cukup Ekonomis

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat (2025), diolah penulis.

Berdasarkan tabel diatas, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat DPRD Jawa Barat pada tahun 2021 menunjukkan bahwa terdapat kegiatan dengan persentase terendah yaitu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, yaitu sebesar 81,68%. Sebaliknya, persentase tertinggi dicapai oleh kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan capaian ekonomis sebesar 99,76%. Berdasarkan teori Mahmudi (2019) kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ini tergolong dalam kriteria kurang ekonomis, sedangkan kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tergolong dalam kriteria cukup ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD Jawa Barat telah melaksanakan sebagian besar kegiatan dalam program ini dengan tingkat ekonomis yang baik. Di mana dari total 9 kegiatan, sebanyak 8 di antaranya mencapai persentase ekonomis di atas 85%.

Lebih lanjut, berikut disajikan hasil perbandingan data yang diperoleh untuk tahun 2022. Persentase kriteria ekonomi dari setiap kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Perhitungan Ekonomis Tahun 2022

No	Kegiatan	Belanja		Ekonomis	Kriteria Menurut Mahmudi (2019)
		Anggaran	Realisasi		
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.193.824.395	1.682.789.181	76,71%	Kurang Ekonomis

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.448.989.875	27.858.839.899	85,85%	Cukup Ekonomis
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.064.091.000	1.017.009.500	95,58%	Cukup Ekonomis
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26.842.494.046	26.362.546.119	98,21%	Cukup Ekonomis
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18.509.842.049	18.106.309.579	97,82%	Cukup Ekonomis
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29.056.662.010	28.026.342.177	96,45%	Cukup Ekonomis
8	Layanan Administrasi DPRD	8.839.598.557	8.698.692.584	98,41%	Cukup Ekonomis
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	169.384.271.600	161.690.936.554	95,46%	Cukup Ekonomis

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat (2025), diolah penulis.

Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2022, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mencatat persentase ekonomis tertinggi terdapat pada kegiatan Layanan Administrasi, yaitu sebesar 98,41%, yang tergolong dalam kriteria cukup ekonomis. Sedangkan persentase ekonomis terendah terdapat pada kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang hanya mencapai 76,71% dengan kriteria kurang ekonomis. Meski demikian, sebagian besar kegiatan yang ada pada program ini memiliki persentase di atas 85%, yang menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Sekretariat DPRD telah berusaha untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan tetap memperhatikan prinsip ekonomis, meskipun masih terdapat beberapa kegiatan maupun subkegiatan yang perlu diperbaiki untuk mencapai realisasi anggaran yang lebih tinggi.

Selanjutnya, berdasarkan hasil perbandingan data yang diperoleh untuk tahun 2023, persentase kriteria ekonomi dari setiap kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perhitungan Ekonomis Tahun 2023

No	Kegiatan	Belanja		Ekonomis	Kriteria Menurut Mahmudi (2019)
		Anggaran	Realisasi		
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.017.496.105	1.988.897.296	98,58%	Cukup Ekonomis
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	29.407.572.931	27.527.474.437	93,61%	Cukup Ekonomis

3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.457.371.520	1.391.639.000	95,49%	Cukup Ekonomis
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	58.821.832.256	56.817.784.833	96,59%	Cukup Ekonomis
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.887.142.023	21.461.972.252	98,06%	Cukup Ekonomis
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	39.073.765.069	37.793.278.003	96,72%	Cukup Ekonomis
8	Layanan Administrasi DPRD	5.220.079.980	5.077.122.653	97,26%	Cukup Ekonomis
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	165.698.758.131	164.052.975.812	99,01%	Cukup Ekonomis

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat (2025), diolah penulis.

Berdasarkan tabel diatas, Persentase ekonomis terendah pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD Jawa Barat tahun 2023 terdapat pada kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan nilai sebesar 93,61%, yang termasuk dalam kriteria cukup ekonomis. Sementara itu, persentase tertinggi terdapat pada kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD dengan nilai mencapai 99,01%, yang juga berada dalam kriteria cukup ekonomis. Tabel diatas juga menunjukkan bahwa seluruh kegiatan pada program ini telah mencapai kriteria cukup ekonomis dengan persentase di atas 90%. Hal ini menandakan bahwa pada tahun 2023, Sekretariat DPRD Jawa Barat telah menjalankan seluruh kegiatannya berdasarkan prinsip ekonomis. Penggunaan anggaran pada program ini juga sudah mendekati target yang ditetapkan, meskipun belum ada kegiatan yang mencapai kriteria ekonomis.

Setiap tahunnya Sekretariat DPRD Jawa Barat melakukan pengawasan dan memastikan pengeluaran sesuai dengan anggaran serta sasaran keuangan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara, untuk memantau pelaksanaan anggaran, Sekretariat DPRD menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan e-monev. Aplikasi-aplikasi ini memfasilitasi pengawasan yang lebih transparan dan akurat, serta memungkinkan pemantauan yang lebih efisien terhadap penggunaan anggaran. Selain menggunakan e-monev, pengendalian pengeluaran juga dilakukan melalui pemantauan capaian kinerja. Hal ini memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hubungan antara anggaran yang digunakan dengan hasil yang dicapai. Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran juga berjalan dengan baik, di mana Sekretariat DPRD Jawa Barat melakukan pengendalian melalui pemeriksaan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dan laporan keuangan bulanan. Langkah-langkah pengawasan ini

memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta dapat mengidentifikasi potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian yang perlu segera ditindaklanjuti.

Dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya, Sekretariat DPRD melakukan evaluasi rutin untuk menentukan langkah yang strategis ke depan. Secara umum, anggaran cenderung tetap sama atau tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya karena sifatnya sebagai anggaran penyediaan. Pengurangan anggaran dikhawatirkan dapat menghambat pelaksanaan kegiatan, terutama jika di tahun berikutnya terjadi peningkatan kebutuhan atau antusiasme anggota dewan. Oleh karena itu, evaluasi dan perencanaan yang matang sangat penting untuk memastikan anggaran yang tersedia dapat mencakup kebutuhan yang ada tanpa mengurangi kualitas pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan, untuk kegiatan yang bersifat administratif atau sekretariat, jika realisasinya rendah, akan dilakukan rasionalisasi, yang memungkinkan anggaran tersebut dikurangi pada tahun berikutnya. Evaluasi anggaran ini dilakukan secara rutin setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan berdasarkan laporan yang dihasilkan. Selain melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pengeluaran, Sekretariat DPRD Jawa Barat menggunakan Standar Biaya Umum (SBU) sebagai acuan. Penerapan SBU ini memastikan bahwa seluruh pengeluaran dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia berdasarkan standar belanja yang telah ditetapkan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan dengan baik, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan realisasi anggaran di tahun 2023.

Capaian persentase ekonomi selama tiga tahun berturut-turut menjadi indikator penting dalam menilai konsistensi pengelolaan anggaran di Sekretariat DPRD Jawa Barat. Meskipun berada dalam kriteria cukup ekonomis, Sekretariat DPRD Jawa Barat berhasil menjaga keseimbangan antara alokasi anggaran dan realisasinya untuk mendukung kegiatan program secara efektif, sekaligus menunjukkan upaya penghematan melalui pengelolaan yang bijaksana dan cermat tanpa adanya pemborosan. Menurut Mahmudi (2019), kegiatan dikategorikan ekonomis jika persentase ekonominya lebih dari 100%. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD Jawa Barat, khususnya pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, perlu menyesuaikan kembali proses penyusunan anggaran agar realisasi anggaran dapat lebih tinggi dan mencapai kriteria ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan target realisasi anggaran yang ditetapkan oleh Sekretariat DPRD Jawa Barat yaitu sebesar 100%. Berdasarkan hasil wawan-

cara, target tersebut dihitung berdasarkan indikator pada setiap subkegiatan, sehingga evaluasi ini menjadi dasar penting untuk meningkatkan efisiensi anggaran di tahun-tahun mendatang.

Tingkat Efisiensi

Berdasarkan hasil perbandingan data yang diperoleh, berikut perhitungan efisiensi setiap kegiatan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah periode 2021. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program tersebut dilaksanakan dengan memanfaatkan sumber daya secara optimal guna mencapai hasil yang diharapkan. Berikut perhitungan efisiensi pada tahun 2021:

Tabel 4. Perhitungan Efisiensi Tahun 2021

No	Kegiatan	Realisasi Keuangan (Input)	Realisasi Fisik (Output)	Efisiensi	Kriteria Menurut Mahmudi (2019)
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99,76%	75%	75,18%	Sangat Efisien
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	93,81%	106,67%	113,70%	Tidak Efisien
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	81,68%	100%	122,43%	Tidak Efisien
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96,00%	75%	78,13%	Sangat Efisien
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97,88%	75%	76,63%	Sangat Efisien
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96,28%	75%	77,90%	Sangat Efisien
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97,23%	75%	77,14%	Sangat Efisien
8	Layanan Administrasi DPRD	99,64%	75%	75,27%	Sangat Efisien
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	96,47%	75%	77,74%	Sangat Efisien

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat (2025), diolah penulis.

Berdasarkan tabel diatas, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD Jawa Barat pada tahun 2021 memiliki persentase efisiensi terendah yaitu pada kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, yang hanya mencapai sebesar 75,18% dan masuk dalam kriteria sangat efisien. Sebaliknya, persentase efisiensi tertinggi ditemukan pada kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan nilai sebesar 122,43%, yang tergolong tidak efisien. Meskipun demikian, secara keseluruhan, kegiatan dalam program ini telah mencerminkan prinsip efisiensi, dengan hanya dua dari sembilan kegiatan yang

tergolong tidak efisien.

Lebih lanjut, untuk tahun 2022, berdasarkan hasil perbandingan data yang diperoleh, kriteria efisiensi untuk setiap kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Perhitungan Efisiensi Tahun 2022

No	Kegiatan	Realisasi Keuangan (Input)	Realisasi Fisik (Output)	Efisiensi	Kriteria Menurut Mahmudi (2019)
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	76,71%	100%	130,37%	Tidak Efisien
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85,85%	52,31%	60,93%	Sangat Efisien
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95,58%	100%	104,63%	Tidak Efisien
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	98,21%	100%	101,82%	Tidak Efisien
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97,82%	100%	102,23%	Tidak Efisien
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96,45%	100%	103,68%	Tidak Efisien
8	Layanan Administrasi DPRD	98,41%	100%	101,62%	Tidak Efisien
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	95,46%	100%	104,76%	Tidak Efisien

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat (2025), diolah penulis.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, terdapat kegiatan yang tidak lagi dilaksanakan pada tahun 2022 yaitu kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Penghapusan kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan tingkat urgensinya dan kebutuhan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara, penghapusan kegiatan biasanya mempertimbangkan efisiensi anggaran serta menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai contoh, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Untuk Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dihapus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Meskipun alasan spesifik penghapusan tidak dapat dijelaskan secara rinci, umumnya hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kegiatan yang sudah tidak relevan, tidak lagi dilaksanakan, atau atas dasar pertimbangan efisiensi anggaran.

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa sebagian besar kegiatan dalam Program Pe-

nunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD Jawa Barat pada tahun 2022 tidak menunjukkan tingkat efisiensi yang optimal. Persentase efisiensi terendah adalah kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian efisiensi sebesar 60,93%. Berdasarkan teori Mahmudi (2019), persentase efisiensi ini tergolong dalam kriteria sangat efisien, meskipun angka realisasi fisiknya relatif rendah dibandingkan dengan realisasi keuangannya. Di sisi lain, kegiatan dengan persentase efisiensi tertinggi adalah Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan capaian sebesar 130,37%. Namun, menurut teori Mahmudi (2019), efisiensi dengan nilai melebihi 100% justru tergolong tidak efisien, karena menunjukkan bahwa *output* atau realisasi fisik yang dihasilkan jauh melampaui penggunaan anggaran yang direncanakan. Hal ini dapat mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan awal dengan pelaksanaan, seperti perubahan target atau pengalokasian anggaran yang tidak sesuai.

Selanjutnya, untuk tahun 2023, berdasarkan hasil perbandingan data yang diperoleh, kriteria efisiensi untuk setiap kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Perhitungan Efisiensi Tahun 2023

No	Kegiatan	Realisasi Keuangan (<i>Input</i>)	Realisasi Fisik (<i>Output</i>)	Efisiensi	Kriteria Menurut Mahmudi (2019)
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	98,58 %	100%	101,44%	Tidak Efisien
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	93,61 %	100%	106,83%	Tidak Efisien
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95,49 %	100%	104,72%	Tidak Efisien
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96,59 %	100%	103,53%	Tidak Efisien
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	-
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98,06 %	100%	101,98%	Tidak Efisien
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96,72 %	100%	103,39%	Tidak Efisien
8	Layanan Administrasi DPRD	97,26 %	100%	102,82%	Tidak Efisien
9	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	99,01 %	100%	101%	Tidak Efisien

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat (2025), diolah penulis.

Berdasarkan tabel diatas, seluruh kegiatan dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD Jawa Barat pada tahun 2023 tergolong dalam kriteria tidak

efisien. Meskipun terdapat berbagai persentase dalam tingkat efisiensi disetiap kegiatan, namun seluruh kegiatan mencatatkan persentase efisiensi di atas 100%, yang menurut teori Mahmudi (2019), masuk dalam kriteria tidak efisien. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah mencatat persentase efisiensi tertinggi, yaitu sebesar 106,83%, dengan rincian realisasi keuangan sebesar 93,61% dan realisasi fisik 100%. Meskipun persentase efisiensinya paling tinggi, kegiatan ini tetap masuk sebagai kriteria tidak efisien. Sebaliknya, kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD memiliki persentase efisiensi terendah, yaitu sebesar 101%, dengan rincian realisasi keuangan sebesar 99,01% dan realisasi fisik 100%. Meskipun demikian, kegiatan ini juga tetap masuk dalam kriteria tidak efisien, mengingat persentase efisiensi yang lebih dari 100%. Hasil evaluasi ini mencerminkan bahwa meskipun realisasi fisik sebagian besar kegiatan mencapai atau bahkan melebihi target yang ditentukan, efisiensi penggunaan anggaran masih belum optimal.

Perubahan kriteria efisiensi dari sangat efisien pada tahun 2021 menjadi efisien pada tahun 2022 dan akhirnya tidak efisien pada tahun 2023, mencerminkan adanya tantangan atau kendala yang dihadapi setiap tahunnya. Meskipun demikian, Sekretariat DPRD Jawa Barat tetap berupaya mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Hal ini sejalan dengan penjelasan informan, yang menyatakan bahwa meskipun alokasi anggaran untuk kegiatan sekretariat relatif lebih kecil dibandingkan dengan anggaran untuk kegiatan yang memfasilitasi anggota dewan, namun penggunaan sumber daya tetap dilakukan secara efisien. Selain itu, alokasi anggaran telah direncanakan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, Sekretariat DPRD Jawa Barat mampu menghasilkan *output* yang maksimal dalam pelaksanaan kegiatan suatu program melalui perencanaan dan pengelolaan anggaran yang baik.

Terkait pencapaian *output*, Sekretariat DPRD Jawa Barat juga berusaha untuk mencapai hasil yang maksimal yang ditandai dengan indikator pencapaian *output* pada umumnya telah terpenuhi, meskipun hasil pada tahun 2021 lebih kecil. Hal ini disebabkan oleh dampak transisi akibat pandemi COVID-19, yang memengaruhi capaian *output* secara keseluruhan. Selain itu, faktor internal, seperti proses adaptasi pegawai terhadap perubahan yang ditimbulkan oleh pandemi, juga menjadi tantangan yang dapat mempengaruhi pencapaian *output* suatu kegiatan. Meskipun demikian, Sekretariat DPRD Jawa Barat terus berupaya memaksimalkan sumber daya dan menghasilkan *output* yang maksimal meski menghadapi berbagai hambatan.

Tingkat Efektivitas

Dalam mengukur efektivitas suatu program, langkah pertama yang diperlukan adalah *outcome*, yaitu hasil nyata yang dihasilkan dari pelaksanaan program tersebut. Dalam konteks Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD Jawa Barat tahun 2021-2023, perhitungan *outcome* dilakukan dengan menggunakan indikator yang sudah ditentukan oleh Sekretariat DPRD Jawa Barat. Dengan mengetahui capaian *outcome*, maka dapat dilakukan perhitungan efektivitas pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD Jawa Barat dengan membandingkan capaian *outcome* terhadap output yang dihasilkan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dan memberikan manfaat sesuai dengan perencanaan. Perhitungan efektivitas ini memberikan gambaran kinerja program dalam memenuhi tujuan yang diharapkan dari tahun ke tahun. Berikut adalah perbandingan nilai efektivitas untuk tahun 2021, 2022, dan 2023 yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 7. Perbandingan Nilai Efektivitas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2021-2023

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
No	Tahun	Realisasi Fisik (Output)	Capaian Kinerja (Outcome)	Efektivitas	Kriteria Menurut Mahmudi (2019)
1	2021	81%	148,42%	183,23%	Efektif
2	2022	94,04%	94,83%	100,84%	Efektif
3	2023	100%	100%	100%	Efektif

Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat (2025), diolah penulis.

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD Jawa Barat telah dilaksanakan secara efektif setiap tahunnya. Pada tahun 2021, tingkat efektivitas mencapai 183,23%, yang dikategorikan sangat efektif. Angka ini merupakan capaian tertinggi dibandingkan tahun-tahun lainnya, dengan rincian realisasi fisik sebagai output sebesar 81% dan realisasi kinerja sebagai *outcome* sebesar 148,42%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan program dalam menghasilkan *outcome* yang jauh melebihi target yang ditetapkan.

Pada tahun 2022, efektivitas program mengalami penurunan menjadi 100,84%. Meskipun terjadi penurunan, angka ini tetap tergolong efektif karena nilai efektivitasnya masih melebihi 100%. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut masih mampu mencapai hasil yang sebanding atau lebih dari yang direncanakan. Tingkat efektivitas ini dihitung berdasarkan

rincian realisasi output sebesar 94,04% dan *outcome* sebesar 94,83%. Penurunan efektivitas ini dapat menjadi bahan evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan pelaksanaan program di tahun berikutnya, terutama dalam memastikan bahwa setiap kegiatan memberikan kontribusi maksimal terhadap *outcome* yang diharapkan.

Pada tahun 2023, persentase efektivitas mencapai 100%, dengan output dan *outcome* masing-masing sebesar 100%. Walaupun nilai ini lebih rendah dibandingkan tahun 2022, program tetap dikategorikan efektif karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa program mampu dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan menandakan pengelolaan yang baik dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Secara keseluruhan, tingkat efektivitas Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sekretariat DPRD Jawa Barat mengalami fluktuasi selama periode 2021-2023, yang mencerminkan berbagai dinamika dalam pelaksanaannya. Pada tahun 2021, capaian efektivitas yang tinggi menjadi bukti keberhasilan dalam pelaksanaan program. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan efektivitas, diikuti dengan stabilitas pada tahun 2023. Meskipun demikian, program ini secara keseluruhan tetap menunjukkan kinerja yang efektif.

Penurunan efektivitas tersebut tentunya Sekretariat dapat mengevaluasi pelaksanaan program dan mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan perbaikan. Hal ini juga telah dilakukan oleh Sekretariat DPRD Jawa Barat, yaitu dengan melakukan evaluasi rutin setiap triwulan dan tahunan untuk menilai pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan evaluasi tersebut, akan dilakukan pengkajian lebih lanjut untuk mencari solusi jika terdapat kegiatan yang belum optimal. Sebagai langkah perbaikan, Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan penelaahan terhadap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya, agar pelaksanaannya menjadi lebih baik dan optimal. Selain itu, dalam menetapkan indikator, sebaiknya tidak menetapkan target yang terlalu tinggi, melainkan disesuaikan dengan kemampuan yang dapat tercapai.

Dengan demikian, Sekretariat DPRD Jawa Barat dapat fokus pada pencapaian realisasi output dan *outcome*, serta meningkatkan sinergi antar berbagai kegiatan untuk terus memberikan hasil yang optimal di tahun-tahun berikutnya. Meskipun terdapat fluktuasi dalam tingkat efektivitas, program ini secara keseluruhan telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pencapaian tujuan Sekretariat.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan mengenai kinerja anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat DPRD Jawa Barat selama periode 2021-2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat DPRD Jawa Barat selama periode 2021-2023 telah berhasil memaksimalkan prinsip ekonomis dengan menjaga keseimbangan alokasi dan realisasi anggaran, serta prinsip efektivitas dengan mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Namun, prinsip efisiensi belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal karena terdapat variasi kriteria efisiensi antara tahun 2021-2023. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya, serta pengawasan yang lebih baik untuk memastikan penggunaan anggaran yang seimbang dengan output yang dihasilkan. Hal ini penting agar kinerja program dapat semakin sesuai dengan prinsip *value for money*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I. M. (2020). *Penganggaran Perusahaan*. Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS).
- Lamidi, L. (2022). The Importance of Public Participation in Performance-Based Budgeting in Indonesia. *Policy and Social Review*, 2(1), 37–43.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI Yogyakarta.
- Samsu. (2017). *Metode Penelitian*. Pustaka Jambi.
- Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. (2024). *Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD*.
- Sekretariat DPRD Prov Jabar. (2021a). *Laporan Kinerja (LAKIN) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat 2021*.
- Sekretariat DPRD Prov Jabar. (2021b). *Rencana Kerja Tahun 2021 Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat*.
- Sekretariat DPRD Prov Jabar. (2022a). *Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat*.
- Sekretariat DPRD Prov Jabar. (2022b). *Sekretariat DPRD Prov Jabar. (2021). Laporan Kinerja (LAKIN) Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat 2022*.
- Sekretariat DPRD Prov Jabar. (2023a). *Laporan Kinerja (LAKIN) Sekretariat DPRD Provinsi*



Jawa Barat 2023.

Sekretariat DPRD Prov Jabar. (2023b). *Rencana Kerja Tahun 2023 Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.*

Sekretariat DPRD Prov Jabar. (2024). *Rencana Kerja Tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat.*

Sugiyono, Prof. Dr. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.*

ALFABETA.

Sulisworo, D. (2009). *Pengukuran Kinerja.*